

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisukmawati. “Efektivitas Jalur Litigasi Dan Jalur Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Laut Indonesia Berdasarkan Unclos 1982.” *Kertha Wicara* 9, no. 12 (2020): 1–15.
- Admin. “Kasus Tumpahan Minyak Montara : 10 Tahun Satu Gugatan.” *VOA Indonesia*, 2019. <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-tumpahan-minyak-montara-10-tahun-satu-gugatan/5134088.html>.
- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: CV Rajawali, 1991.
- Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori Dan Praktik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Badan Pelatihan Hukum-Pusham UII, 2005.
- Bethan, Syamsuhardi. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional: Sebuah Upaya Penyelamatan Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Antar Generasi*. Bandung: Alumni, 2008.
- Burhanuddin, Andi Iqbal. *The Sleeping Giant: Potensi Dan Permasalahan*

Kelautan,. Surabaya: Brilian Internasional, 2011.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Edisi Kese. New York: Claitors Pub Division, 2014.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Harris, D.J. *Cases and Materials on International Law*. London: Sweet and Maxwell, 1982.

Harse, Grant A. "Plastic, the Great Pacific Garbage Patch, and International Misfires at a Cure." *UCLA Journal of Environmental Law and Policy* 29 (2011): 345.

Hingorani. *Modern International Law*. Second Edi. Oceana Publication, 1984.

Istanto, F. Sugeng. *Hukum Internasional, Edisi Revisi*. Edisi Revi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

K. Raubenheimer, A. McIlgorm. "Can the Basel Convention and Stockholm Conventions Provide a Global Framework to Reduce the Impact of Marine Plastic Litter?" *Marine Policy* (2018): 3.

Kalalo, Julianto Jover Jotam. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Imunitas Negara Melalui ICJ (International Court of Justice)/Mahkamah Internasional." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 3 2 (2016): 98–109.

- Kompas. "Kasus Montara Perlu Sinergi Pemerintah Dan Masyarakat." Jakarta, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Bina Cipta, 1997.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2005.
- Muhamad Muhdar. "Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 67–80.
- Mukhlis. "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Konstitusi* Vol.7, no. 2 (2010): 70.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- . *Hukum Perjanjian Internasional*. Bagian 1. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Statuta Mahkamah Internasional*, 1945.
- . *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA*, 1982.
- . *Vienna Convention on the Law of Treaties*, 1969.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut*. Indonesia, 1999.

Prijanto, Heru. *Maritime Law*. Malang: Bayumedia, 2007.

Raveena, Aneska Zoya. “Apa Yang Dimaksud Dengan Hukum Laut Internasional.” Last modified 2017. <https://www.dictio.id/t/apayang-dimaksud-dengan-hukum-laut-internasional/9285>.

S., R Moch. Ramadhan Putra. “Implikasi Hukum Pemberhentian Berlakunya Agreement Between The Government Of The Kingdom Of The Netherlands And The Government Of The Republic Of Indonesia On Promotion And Protection Of Investment 1994 Oleh Indonesia.” Universitas Pasundan, 2017.

S, Rizza Ayu, and Rahayu Repindowaty Harahap. “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut Antara Indonesia-Vietnam Di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 2 (2021): 167–188.

Samekto, F.X. Aji. “Keterkaitan Kapitalisme Dengan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dan Implementasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Dalam Studi Hukum Kritis.” UNDIP, 2004.

Santosa, Ahmad. “Aktualisasi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Dan Praktik Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum Lingkungan* (1996): 13.

Sefriani. *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Shaw, Malcolm N. *International Law*. 6th ed. New York: Cambridge University

Press, 2008.

Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2009.

Silalahi, M. Daud. “Peran Dan Kedudukan Hukum Lingkungan Internasional Dewasa Ini.” *Jurnal Hukum Internasional* Vol.2, no. 2 (2005): 253.

Situngkir, D.A. “Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional” 13, no. 1 (n.d.): 19–25.

Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Edisi Revi. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Soemarwoto, Otto. *Ekologi: Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan, 1991.

Sopiana, Angga. “Subjek Hukum Internasional.”

Suci Meinarni, Ni Putu. “Hambatan Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Minyak Montara.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 3, no. 2 (2017): 84.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Susi Rosmiati, Indra Pahlawan. “Tanggung Jawab British Petroleum Dalam Kasus Tumpahan Minyak Di Teluk Meksiko” (n.d.).

Thontowi, Jawahir. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: Reika Aditama, 2006.

Wallace, Rebecca M.M. *International Law*. Fourth Edi. London: Sweet and Maxwell, 2002.

Wibisana, Andri G. “Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 1 (2013): 58.

Wiharjanti, Tri, and Dia Apriani Atika Sari. “Prinsip Good Neighborliness Dalam Pencemaran Asap Lintas Batas (Trasnboundary Haze Pollution) Di Kawasan Asean.” *Belli ac Pacis* 2, no. 2 (2016): 16–22.

<https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/download/27450/18984>.

Yakin, Umarul. “Implementasi Perjanjian Internasional Asean China Free Trade Agreement (Acfta) Dalam Bidang Perdagangan Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.” UNPAS, 2018.

“Montara and Environmental Justice.” *The Jakarta Post*. Jakarta, 2021.

<https://www.thejakartapost.com/academia/2021/03/25/montara-and-environmental-justice.html>.